

PENGADILAN TINGGI BENGKULU

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 30 September Tahun 2023

Jl. Pembangunan No. 21 Padang Harapan

Bengkulu - Bengkulu 38225

Telp. 073621585 Fax. 073621585

E-mail : pt_bengkulu@yahoo.co.id



LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN TINGGI BENGKULU

Untuk Periode yang Berakhir 30 September 2023

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Pembangunan No. 21 Padang Harapan

Telp. 073621585 Fax. 073621585

Bengkulu - Bengkulu 38225

E-mail : pt_bengkulu@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Bengkulu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Tinggi Bengkulu. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Bengkulu, 16 Oktober 2023
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,



NURSANI, S.H
NIP.196606101991031005

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	3
Daftar Tabel dan Lampiran	6
Pernyataan Tanggung Jawab	9
Ringkasan	10
I. Laporan Realisasi Anggaran	14
II. Neraca	16
III. Laporan Operasional	19
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	21
V. Catatan atas Laporan Keuangan	23
A. Penjelasan Umum	23
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tinggi Bengkulu	23
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	24
A.3. Basis Akuntansi	24
A.4. Dasar Pengukuran	24
A.5. Kebijakan Akuntansi	25
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran	33
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	33
B.2. Belanja	34
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	40
C.1. Aset Lancar	40
C.2. Aset Tetap	42
C.3. Aset Lainnya	47
C.4. Kewajiban Jangka Pendek	49
C.5. Ekuitas	51
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	52
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak	52
D.2. Beban Pegawai	52

D.3.	Beban Persediaan.....	53
D.4.	Beban Barang dan Jasa.....	53
D.5.	Beban Pemeliharaan	54
D.6.	Beban Perjalanan Dinas.....	55
D.7.	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	55
D.8.	Beban Bantuan Sosial.....	56
D.9.	Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	57
D.10.	Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	57
D.11.	Beban Lain-lain.....	58
D.12.	Kegiatan Non Operasional.....	58
D.13.	Pos Luar Biasa	59
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	60
E.1.	Ekuitas Awal	60
E.2.	Surplus (Defisit) LO.....	60
E.3.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar	60
E.4.	Koreksi Menambah/Mengurangi	60
E.4.1.	Penyesuaian Nilai Aset	60
E.4.2.	Koreksi Nilai Persediaan	60
E.5.	Transaksi Antar Entitas.....	62
	Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2022 disajikan pada lampiran.....	63
E.6.	Ekuitas Akhir	64
F.	Pengungkapan Penting Lainnya.....	65
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	65
F.2.	Pengungkapan Lain-lain	65
	Laporan-laporan Pendukung.....	67
	Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap	68
	Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual	71

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel dan Lampiran

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2023 dan 2022	10
Tabel 2 Ringkasan Neraca per 30 September 2023 dan 2022.....	11
Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang	27
Tabel 4 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap.....	30
Tabel 5 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	31
Tabel 6 Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).....	33
Tabel 7 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPNP per 30 September 2023	33
Tabel 8 Perbandingan Realisasi PNBPNP per 30 September TA 2023 dan 2022.....	34
Tabel 9 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 September TA 2023	34
Tabel 10 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 September TA 2023	35
Tabel 11 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 September TA 2023 dan TA 2022.....	35
Tabel 12 Perbandingan Belanja Pegawai per 30 September TA 2023 dan TA 2022	36
Tabel 13 Perbandingan Belanja Barang per 30 September TA 2023 dan TA 2022	37
Tabel 14 Perbandingan Belanja Modal per 30 September TA 2023 dan TA 2023	38
Tabel 15 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2023 dan 2022	38
Tabel 16 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 dan 2022	39
Tabel 17 Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2023 dan 2022	39
Tabel 18 Rincian Aset Lancar per 30 September 2023 dan 2022	40
Tabel 19 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran.....	40
Tabel 20 Rincian Uang Muka Belanja	Error! Bookmark not defined.
Tabel 21 Rincian Piutang Bukan Pajak.....	41
Tabel 22 Rincian Aset Tetap	42
Tabel 23 Rincian Saldo Tanah.....	43
Tabel 24 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	47
Tabel 25 Rincian Aset Lainnya	48
Tabel 26 Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 September 2023 dan 2022	49
Tabel 27 Rincian Utang kepada Pihak Ketiga.....	50
Tabel 28 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPNP per 30 September TA 2023	52
Tabel 29 Rincian Beban Pegawai per 30 September TA 2023 dan TA 2022.....	52
Tabel 30 Rincian Beban Persediaan per 30 September TA 2023 dan TA 2022	53
Tabel 31 Rincian Beban Barang dan Jasa per 30 September TA 2023 dan TA 2022.....	54
Tabel 32 Rincian Beban Pemeliharaan per 30 September TA 2023 dan TA 2022	55
Tabel 33 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 September TA 2023 dan TA 2022	55
Tabel 34 Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	56
Tabel 35 Rincian Beban Bantuan Sosial.....	56
Tabel 36 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	57
Tabel 37 Rincian Beban Piutang tak Tertagih	58
Tabel 38 Rincian Beban Lain-lain.....	58
Tabel 39 Rincian Kegiatan Non Operasional.....	59
Tabel 40 Rincian Pos Luar Biasa	59
Tabel 41 Rincian Koreksi Nilai Persediaan	61

Tabel 42	Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2023	61
Tabel 43	Rincian Koreksi Lain-lain	62
Tabel 44	Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas.....	62
Tabel 45	Rincian Transfer Masuk	63
Tabel 46	Rincian Pengesahan Hibah.....	63
Tabel 47	Rincian nilai perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap untuk Periode yang Berakhir 30 September 2023	69

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Tinggi Bengkulu

Jl. Pembangunan No. 21 Padang Harapan Bengkulu - Bengkulu 38225

Telp. 073621585 Fax. 073621585 E-mail : pt_bengkulu@yahoo.co.id

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Bengkulu yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Bengkulu telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bengkulu, 16 Oktober 2023

Kuasa Pengguna Anggaran,

Sekretaris,



NURSANI, S.H

NIP.196606101991031005

RINGKASAN

Ringkasan

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Bengkulu Triwulan III Tahun Anggaran 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2023 dengan realisasi nya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2023 s.d. 30 September 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.27,190,488 atau mencapai 111 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp.24,478,000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2023 adalah sebesar Rp.16,339,612,462 atau mencapai 80 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.20,384,316,000.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2023 dan 2022 dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2023 dan 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran	Realisasi	% real. Thd anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	24,478,000	27,190,488	111	55.058.855
Belanja Negara	20,384,316,000	16,339,612,462	80	16.468.815.893

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 September 2023 dan 2022. Nilai Aset per 30 September 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp.34,818,436,594,- yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp.93,981,205,-; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.34,724,455,389,-; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp.0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.0,-.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp.1,344,678,776,- yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp.1,344,678,776,- dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp.0. Nilai Ekuitas disajikan sebesar Rp.33,473,757,818,-.

Ringkasan Neraca per 30 September 2023 dan 2022 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2 Ringkasan Neraca per 30 September TA 2023 dan 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Periode Neraca		Kenaikan/Penurunan	
	30 September 2023	31 Desember 2022	Rp.	%
Aset				
Aset Lancar	93,981,205	47,682,459	46,298,746	97.10
Aset Tetap	34,724,455,389	35,018,173,250	(293,717,861)	(0.84)
Aset Lainnya	0	0	0	0
Jumlah Aset	34,818,436,594	35,065,855,709	(247,419,115)	(0.71)
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	1,344,678,776	5,458,730	5,458,730	24,533.55
Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0
Jumlah Kewajiban		5,458,730	5,458,730	24,533.55
Ekuitas				
Ekuitas	33,473,757,818	35,060,396,979	35,060,396,979	(4.53)
Jumlah Ekuitas	33,473,757,818	35,060,396,979	35,060,396,979	(4.53)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	34,818,436,594	35,065,855,709	35,065,855,709	(0.71)

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit)-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 September 2023 adalah sebesar Rp.31,044,526,- sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp.18,021,586,911,- sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp(17,990,542,385,-).

Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp.(0,-) dan surplus(defisit) sebesar Rp.0 sehingga entitas mengalami surplus(defisit)-LO sebesar Rp.(17,990,542,385,-).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar 35,060,396,979,- dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar Rp.(17,990,542,385,-) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp.(0,-) dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp.16,403,903,224,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 September 2023 adalah senilai Rp.33,473,757,818,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 September 2023, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 September 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN TINGGI BENGKULU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2023 DAN 2022
(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	TA 2023			TA 2022
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	24,478,000	27,190,488	111	55,058,855
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		24,478,000	27,190,488	111	55,058,855
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	17,166,850,000	14,037,573,967	82	13.537.058.659
2.	Belanja Barang	B.2.2.	3,000,029,000	2,302,038,495	77	2.288.176.240
3.	Belanja Modal	B.2.3.	217,437,000	0	0	643.580.994
	Jumlah Belanja Negara		20,384,316,000	16,339,612,462	80	16.468.815.893

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN TINGGI BENGKULU
NERACA
PER 30 SEPTEMBER 2023 DAN 2022
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 September 2023	31 Desember 2022
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	60.000.000	0
Piutang Bukan Pajak	C.1. 2.	1,860,000	0
Persediaan	C.1. 3.	32,120,500	42,682,459
Jumlah Aset Lancar		93,981,205	47,682,459
Aset Tetap	C.2		
Tanah	C.2. 1.	28.332.813.000	28.332.813.000
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	4,907,657,615	4,803,107,615
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	9,660,923,000	9,660,923,000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4.	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.	18.680.950	18.680.950
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2. 6.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 7.	(8,195,619,176)	(7,797,351,315)
Jumlah Aset Tetap		34,724,455,389	35,018,173,250
Aset Lainnya	C.3		
Aset Lain-Lain	C.3. 1.	0	0
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3. 2.	(0)	(0)
Jumlah Aset Lainnya		0	0
Jumlah Aset		34,818,436,594	35,065,855,709
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	C.4		

Utang kepada Pihak Ketiga	C.4. 1.	1,257,498,555	3,465,397
Utang yang Belum Ditagihkan	C.4. 2.	27,180,221	0
Pendapatan Diterima Dimuka	C.4. 3.	0	1,993,333
Uang Muka dari KPPN	C.4. 4.	60.000.000	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		1,344,678,776	5,458,730
Jumlah Kewajiban		1,344,678,776	5,458,730
EKUITAS			
Ekuitas	C.5	33,473,757,818	35,060,396,979
Jumlah Ekuitas		33,473,757,818	35,060,396,979
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		34,818,436,594	35,065,855,709

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN TINGGI BENGKULU
LAPORAN OPERASIONAL
PER 30 SEPTEMBER 2023 DAN 2022
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 September 2023	30 September 2022
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D. 1	31,044,526	25.046.533
Jumlah Pendapatan		31,044,526	25.046.533
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	15,265,921,522	14.634.954.076
Beban Persediaan	D. 3	53,494,400	68.607.000
Beban Barang dan Jasa	D. 4	1,517,402,928	1.637.526.672
Beban Pemeliharaan	D. 5	665,833,636	400.477.945
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	133,735,314	266.749.947
Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	0	419.165.549
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
Jumlah Beban		17.427.481.189	17.427.481.189
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(17,990,542,385)	(17.402.434.656)
Kegiatan Non Operasional			
	D. 12		
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		32.201.212	32.201.212
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0

Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		32.201.212	32.201.212
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(17,990,542,385)	(17.370.233.444)
Pos Luar Biasa	D. 13	0	0
Beban Luar Biasa		0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional		(17,990,542,385)	(17.370.233.444)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN TINGGI BENGKULU
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 30 SEPTEMBER 2023 DAN 2022
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 September 2023	30 September 2022
Ekuitas Awal	E.1	35,060,396,979	35.091.699.254
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E.2	(17,990,542,385)	(17.370.233.444)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar	E.3	0	0
Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	E.4		
Penyesuaian Nilai Aset	E.4.1	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E.4.2	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.4.3	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.4.4	0	0
Koreksi Lain-lain	E.4.5	0	0
Jumlah Koreksi Ekuitas		0	0
Transaksi Antar Entitas	E.5	16,403,903,224	16.413.757.038
Ekuitas Akhir		33,473,757,818	34.114.381.953

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

V. *CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN*

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tinggi Bengkulu

Visi Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah terwujudnya Pengadilan Tinggi Bengkulu yang Agung. Sehingga terjalin kesinambungan dengan visi Mahkamah Agung RI yang menginginkan agar Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya menjadi lembaga yang dihormati, dimana didalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas_pokoknya.

Misi Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Bengkulu
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Bengkulu
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tinggi Bengkulu

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Tinggi Bengkulu melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

Rencana strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikan Rencana Strategis, Pengadilan Tinggi Bengkulu akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misi untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai mengingat Rencana Strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Rencana Strategis yang ditetapkan Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan dan kinerja Pengadilan agar lebih efektif dan efisien
2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Triwulan III Tahun Anggaran 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Pengadilan Tinggi Bengkulu menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Triwulan III Tahun Anggaran 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan

membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs

tengah BI pada tanggal neraca.

- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (*satu juta rupiah*);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (*dua puluh lima juta rupiah*);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan

jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2016 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

- Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang

jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

Selama periode berjalan, Pengadilan Tinggi Bengkulu telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan.

Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Tabel 6 Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan Negara dan Hibah		
Penerimaan Perpajakan	0	0
Penerimaan Negara Bukan Pajak	24,478,000	24,478,000
Hibah	0	0
Jumlah Pendapatan dan Hibah	24,478,000	24,478,000
Belanja		
Belanja Pegawai	17,166,850,000	17,166,850,000
Belanja Barang	3,007,079,000	3,000,029,000
Belanja Modal	0	217,437,000
Jumlah Belanja	20,173,929,000	20,384,316,000

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah: Rp.
27,190,488*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 adalah sebesar Rp.27,190,488 atau mencapai 111.08 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.24,478,000. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Tabel 7 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 September TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	24,478,000	19,323,562	78.94
2.	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	7,767,567	0

3.	Pendapatan Anggaran Lain-Lain	0	99,359	0
Total Pendapatan		24,478,000	27,190,488	111.08

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp.(27,868,367) atau 50.62 persen dibandingkan periode yang sama TA 2022.

Hal ini disebabkan karena pada TA 2023 tidak terdapat Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin melalui proses Lelang.

Perbandingan realisasi PNBPA TA 2023 dan 2022 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 8 Perbandingan Realisasi PNBPA per 30 September 2023 dan 2022
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2023	TA 2022	Perubahan	
				Rp.	%
1.	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	32.201.212	(32.201.212)	(100)
2.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	19,323,562	22.857.643	(3,534,081)	(15.46)
3.	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	7,767,567	0	7,767,567	0
4.	Pendapatan Anggaran Lain-Lain	99,359	0	99,359	0
Total Pendapatan		27,190,488	55.058.855	(27,868,367)	(50.62)

B.2. Belanja

Realisasi Belanja
Negara : Rp.
16,339,612,462

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Tinggi Bengkulu per 30 September TA 2023 adalah sebesar Rp.16,339,612,462 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 80% dari anggaran senilai Rp.20,384,316,000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini

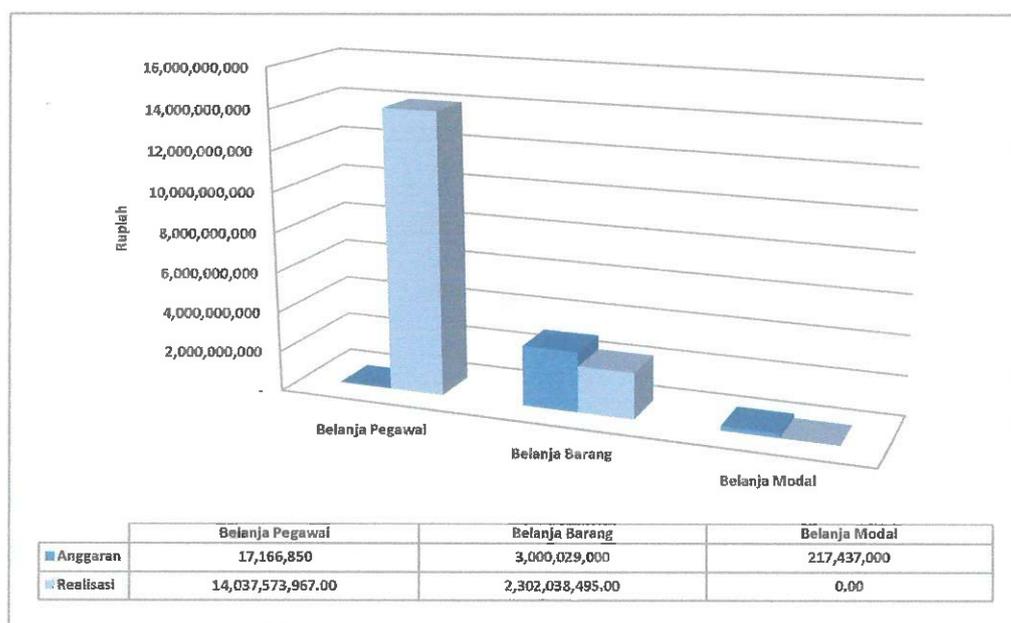
Tabel 9 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 September TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 September TA 2023		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	17,166,850,000	14,038,238,997	81.78

Belanja Barang	3,000,029,000	2,302,038,495	76.73
Belanja Modal	217,437,000	0	0
Total Belanja Bruto	20,384,316,000	16,340,277,492	80.16
Pengembalian Belanja	0	665,030	0
Total Belanja Netto	20,384,316,000	16,339,612,462	80.16

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 10 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 September TA 2023
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) 2023 & 2022

Realisasi Belanja Negara mengalami penurunan sebesar Rp(129,203,431) atau sebesar 0.78 persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Penurunan tersebut disebabkan karena belum terealisasinya Belanja Modal yang merupakan Pagu Anggaran Tambahan dari Mahkamah Agung RI di awal September TA 2023.

Perbandingan realisasi belanja TA 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 September TA 2023 dan TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun)	
			Rp.	%
Belanja Pegawai	14,037,573,967	13.537.058.659	500,515,308	3.70
Belanja Barang	2,302,038,495	2.288.176.240	13,862,255	0.61

Belanja Modal	0	643.580.994	(643,580,994)	2,058.94
Total Belanja	16,339,612,462	16.468.815.893	(129,203,431)	(0.78)

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja
Pegawai : Rp.
14,037,573,967

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Tinggi Bengkulu per 30 September TA 2023 dan TA 2022 adalah sebesar Rp.14,037,573,967 dan Rp.13.537.058.659.

Realisasi Belanja Pegawai pada Triwulan III TA 2023 mengalami peningkatan sebesar 3.70 persen dibandingkan Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 pada periode yang sama. Hal ini disebabkan antara lain karena adanya penambahan Hakim dan Pegawai di Lingkungan Pengadilan Tinggi Bengkulu.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 12 Perbandingan Belanja Pegawai per 30 September TA 2023 dan TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	3,356,421,040	3.475.648.112	(119,227,072)	(3.43)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	46,162	44.166	1,996	4.52
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	259,516,510	275.334.528	(15,818,018)	(5.75)
Belanja Tunj. Anak PNS	54,002,870	48.380.488	5,622,382	11.62
Belanja Tunj. Struktural PNS	71,730,000	73.755.000	(2,025,000)	(2.75)
Belanja Tunj. Fungsional PNS	7,436,313,000	6.908.555.000	527,758,000	7.64
Belanja Tunj. PPh PNS	1,443,035,405	1.406.736.888	36,298,517	2.58
Belanja Tunj. Beras PNS	144,079,980	147.483.720	(3,403,740)	(2.31)
Belanja Uang Makan PNS	382,804,000	392.071.000	(9,267,000)	(2.36)
Belanja Tunjangan Umum PNS	39,425,000	41.050.000	(1,625,000)	(3.95)
Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc	850,200,000	768.000.000	82,200,000	10.71
Belanja Uang Lembur	0	0	0	0
Total Belanja Brutto	14,038,238,997	13,537,058,902	501,180,095	3.70
Pengembalian Belanja	(665,030)	(243)	(664,787)	(273,574.9)
Total Belanja Netto	14,037,573,967	13.537.058.659	500,515,308	3.7

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja
Barang : Rp.
2,302,038,495

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Tinggi Bengkulu per 30 September TA 2023 dan TA 2022 adalah sebesar Rp.2,302,038,495 dan Rp. 2.288.176.240.

Realisasi Belanja Barang pada Triwulan III TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp13,862,255 atau sebesar 0.61 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang Triwulan III TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain meningkatnya realisasi Belanja Pemeliharaan yang telah dilaksanakan pada periode Triwulan III TA 2023.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 13 Perbandingan Belanja Barang per 30 September TA 2023 dan TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp.	%
Belanja Barang Operasional	512,920,153	561.694.195	(48,774,042)	(8.68)
Belanja Barang Non Operasional	5,520,000	21.574.200	(16,054,200)	(74.41)
Belanja Jasa	962,771,561	1.013.526.767	(50,755,206)	(5.01)
Belanja Pemeliharaan	637,824,567	373.859.331	263,965,236	70.61
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	129,779,514	256.519.947	(126,740,433)	(49.41)
Belanja Barang Persediaan	53,222,700	61.001.800	(7,779,100)	(12.75)
Total Belanja Brutto	2,302,038,495	2.288.176.240	13,862,255	0.61
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	2,302,038,495	2.288.176.240	13,862,255	0.61

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi Belanja
Modal : 0.

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Tinggi Bengkulu per 30 September TA 2023 dan TA 2022 adalah sebesar Rp.0 dan Rp. 643.580.994. Realisasi Belanja Modal pada Triwulan III TA 2023 mengalami penurunan dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2022 pada periode yang sama. Hal ini disebabkan karena pagu anggaran Belanja Modal pada TA 2023 ini adalah merupakan Pagu Anggaran Tambahan dari Mahkamah Agung RI yang baru masuk di DIPA satker Pengadilan Tinggi Bengkulu pada awal Bulan September 2023.

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 14 Perbandingan Belanja Modal per 30 September TA 2023 dan TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Perubahan	
			Rp.	%
Belanja Modal Tanah	0	0	0	0,00
Belanja Modal Peralatan & Mesin	0	643.580.994	(643.580.994)	(100)
Belanja Modal Gedung & Bangunan	0	0	0	0,00
Belanja Modal Lainnya	0	0	0	0,00
Total Belanja Brutto	0	643.580.994	(643.580.994)	(100)
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	0	643.580.994	(643.580.994)	(100)

a) Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Realisasi tersebut pada periode Triwulan III TA 2023 tidak mengalami perubahan dibandingkan TA 2022.

Tabel 15 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2023 dan 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Perubahan	
			Rp.	%
Belanja Modal Tanah	0	0	0	0
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	0	0
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	0	0
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	0	0	0
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	0	0
Total Belanja Brutto	0	0	0	0
Pengembalian Belanja	0	0	0	0

Total Belanja Netto	0	0	0	0
---------------------	---	---	---	---

b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Triwulan III TA 2023 adalah sebesar Rp.0, mengalami penurunan bila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 pada periode yang sama.

Tabel 16 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 dan 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Perubahan	
			Rp.	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	643.580.994	(643.580.994)	(100)
Total Belanja Brutto	0	643.580.994	(643.580.994)	(100)
Pengembalian Belanja	0	0	0	0,00
Total Belanja Netto	0	643.580.994	(643.580.994)	(100)

c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal pada Triwulan III TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0. dan Rp.0. Realisasi Belanja Modal pada Triwulan III TA 2023 tidak mengalami perubahan bila dibandingkan Realisasi TA 2022.

Tabel 17 Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2023 dan 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Perubahan	
			Rp.	%
Gedung Tempat Kerja	0	0	0	0
Gedung Tempat Tinggal	0	0	0	0
Total Belanja Brutto	0	0	0	0
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	0	0	0	0

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset Lancar

Aset Lancar:
Rp.93,981,205

Nilai Aset Lancar per 30 September 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.93,981,205 dan Rp.47,682,459. Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Tinggi Bengkulu per 30 September 2023 dan Tahun 2022 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 18 Rincian Aset Lancar per 30 September 2023 dan 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022
Kas di Bendahara Pengeluaran	60.000.000	0
Piutang Bukan Pajak	1,860,705	0
Persediaan	32,120,500	47,682,459
Total Aset Lancar	93,981,205	47,682,459

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara
Pengeluaran:
Rp.60.000.000

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 September 2023 dan Tahun 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.60.000.000 dan Rp.0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Tabel 19 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 September 2023	31 Desember 2022
1.	Uang Muka dari KPPN	60.000.000	0
	Jumlah	0	0

C.1.2. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak: Rp.1,860,000

Piutang Bukan Pajak per 30 September 2023 dan Tahun 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.1,860,000 dan Rp.0 . Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Rincian Piutang Bukan Pajak per tanggal 30 September 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 21 Rincian Piutang Bukan Pajak
TA 2023

No.	Debitur	30 September 2023	31 Desember TA 2022
1.	Pendapatan Sewa Rumah Dinas	1,860,000	0
Jumlah Total		1,860,000	0

C.1.3. Persediaan

Persediaan : Rp.32,120,500,-

Persediaan per 30 September 2023 dan Tahun 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.32,120,500,- dan Rp.47,682,459. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 September 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 22 Rincian Persediaan per 30 September TA 2023 dan 31 Desember 2022

No.	Uraian	30 September 2023	31 Desember 2022
1	Barang Konsumsi	30,282,600	44,524,000
2	Bahan Untuk Pemeliharaan	1,837,900	3,158,459
Total		32,120,500	47,682,459

C.2. Aset Tetap

*Aset Tetap : Rp
34,724,455,389*

Nilai Aset Tetap per 30 September 2023 dan 2022 tersaji sebesar Rp.34,724,455,389 dan Rp.35,018,173,250. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 30 September TA 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 4 Rincian Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2023	TA 2022	Perubahan
1	Tanah	28.332.813.000	28.332.813.000	0
2	Peralatan dan Mesin	4,907,657,615	4,803,107,615	104,550,000
3	Gedung dan Bangunan	9,660,923,000	9,660,923,000	0
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	18.680.950	18.680.950	(398,267,861)
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0
	Jumlah	42,920,074,565	42,815,524,565	104,550,000
	Akumulasi Penyusutan	(8,195,619,176)	(7,797,351,315)	(398,267,861)
	Nilai Buku Aset Tetap	34,724,455,389	35,018,173,250	(247,419,115)

C.2.1. Tanah

*Tanah:
Rp.28.332.813.000*

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 30 September 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.28.332.813.000 dan Rp.28.332.813.000. Nilai Perolehan Aset berupa Tanah per 30 September 2023 sebesar Rp.28.332.813.000 tidak mengalami perubahan nilai jika dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Mutasi transaksi terhadap Tanah per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2022	28.332.813.000
Mutasi Tambah	
Pembelian	0

Mutasi Kurang	
Transfer Keluar	0
Saldo per 30 September 2023	28.332.813.000
Akumulasi Penyusutan s.d 30 September 2023	0
Nilai Buku 30 September 2023	28.332.813.000

Rincian saldo tanah per tanggal 30 September 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 25 Rincian Saldo Tanah

No.	KIB	Luas (m ²)	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
1.	2.01.01.01.002.1	1.195	A 1429085	Pemerintah RI cq. MARI	Rumah Dinas Hakim Tinggi	491.231.000
2.	2.01.01.01.002.2	2.010	A 1429094	Pemerintah RI cq. MARI	Rumah Dinas Hakim Tinggi	904.886.000
3.	2.01.01.01.002.3	1.933	A 1430646	Pemerintah RI cq. MARI	Rumah Dinas KPT dan WKPT	4.747.422.000
4.	2.01.01.01.002.4	586	07.04.03.09.4.00011	Pemerintah RI cq. MARI	Rumah Dinas Hakim Tinggi	1.480.378.000
5.	2.01.01.04.001.1	8.958	07.04.03.04.4.00083	Pemerintah RI cq. MARI	Gedung Kantor PT Bengkulu	20.710.896.000
Jumlah						28.332.813.000

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan
Mesin : Rp.
4,907,657,615

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 30 September 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.4,907,657,615 dan Rp.4,803,107,615.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2022	4,803,107,615
Mutasi Tambah	

Pembelian	0
Transfer Masuk	104,550,000
Reklas Masuk	6,600,000
Mutasi Kurang	
Rusak Berat	0
Reklas Keluar	6,600,000
Saldo per 30 September 2023	4,907,657,615
Akumulasi Penyusutan s.d 30 September 2023	(4,187,989,330)
Nilai Buku 30 September 2023	719,668,285

Realisasi belanja dalam rangka perolehan aset peralatan dan mesin per 30 September 2023 adalah sebesar Rp.0,-. Mutasi nilai aset Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Mutasi tambah :

Reklasifikasi Masuk dari koreksi pencatatan atas kesalahan input kode barang berupa 4 unit Dispenser senilai Rp.6,600,.000,-;

Transfer Masuk berupa 1 unit Server senilai Rp.84,700,000,-; 1 unit Scanner senilai Rp.19,850,000,-

Mutasi kurang :

Reklasifikasi Keluar dari koreksi pencatatan atas kesalahan input kode barang senilai Rp.6,600,000,-

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan : Rp.
9,660,923,000*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 30 September 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.9,660,923,000,- dan Rp.9,660,923,000.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	9,660,923,000
Mutasi Tambah	
Pengembangan Nilai	0
Hibah	0
Mutasi Kurang	
Transfer Keluar	0
Saldo per 30 September 2023	9,660,923,000
Akumulasi Penyusutan s.d 30 September 2023	(4,007,629,846)
Nilai Buku 30 September 2023	5,653,293,154

Nilai Perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 30 September 2023 sebesar 9,660,923,000 tidak mengalami perubahan dibandingkan periode sebelumnya.

C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan , Irigasi,
dan Jaringan : Rp.0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 September 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2022	0
Mutasi Tambah	
Pengembangan Nilai	0
Mutasi Kurang	
Koreksi Pencatatan Nilai	0
Saldo per 30 September 2023	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 September 2023	0
Nilai Buku 30 September 2023	0

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya:
Rp.18.680.950*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 September 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 18.680.950,- dan Rp. 18.680.950,-.

Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 September 2023 sebesar Rp.18.680.950,- tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan periode 31 Desember 2022.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2022	18.680.950
Mutasi Tambah	
Pembelian	0
Transfer Masuk	0
Mutasi Kurang	
Koreksi Pencatatan Nilai	0
Penghapusan Aset	0
Saldo per 30 September 2023	18.680.950
Akumulasi Penyusutan s.d 30 September 2023	0
Nilai Buku 30 September 2023	18.680.950

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

*Konstruksi dalam
Pengerjaan : Rp. 0*

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 30 September 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0. dan Rp.0.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan Aset
tetap : Rp.
(8,195,619,176)*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing Rp.(8,195,619,176) dan Rp.(7,797,351,315).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 30 September 2023 disajikan pada tabel di bawah ini, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

Tabel 26 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	4,907,657,615	(4,187,989,330)	719,668,285
2	Gedung dan Bangunan	9,660,923,000	(4,007,629,846)	5,653,293,154
3	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	18.680.950	0	18.680.950
	Jumlah	14,587,261,565	(8,195,619,176)	6,391,642,389

C.3. Aset Lainnya

Nilai Perolehan Aset Lainnya per 30 September 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan, baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap.

Tabel 27 Rincian Aset Lainnya
(dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	30 September 2023	TA 2022
1	Aset tak Berwujud	0	0
	Nilai perolehan Aset Lainnya	0	0
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(0)	(0)
	Nilai buku Aset Lainnya	0	0

C.3.1 Aset Lain-lain

Aset Lain-lain :
Rp.0

Saldo aset lain-lain per 30 September 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0 . Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Pengadilan Tinggi Bengkulu serta dalam proses penghapusan dari BMN. Mutasi aset lain-lain dapat dilihat pada tabel di bawah :

Saldo per 31 Desember 2023	0
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 September 2022	0

C.3.2 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi
Penyusutan/Amort
isasi Aset Lainnya :
Rp.0

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 September 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp.289.321.973 dan Rp.3.204.000. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

*Kewajiban Jangka Pendek :
Rp.1,344,678,776*

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 30 September 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.1,344,678,776 dan Rp.5,458,730 . Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Tinggi Bengkulu per 30 September 2023 disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 28 Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 September 2023 dan 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022
Utang Kepada Pihak Ketiga	1,257,498,555	3,465,397
Utang yang Belum Ditagihkan	27,180,221	0
Pendapatan Diterima Dimuka	0	1,993,333
Uang Muka dari KPPN	60.000.000	0
Jumlah	1,344,678,776	5,458,730

C.4.1 Utang kepada Pihak Ketiga

*Utang kepada Pihak Ketiga:
Rp.1,257,498,555*

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 30 September 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.1,257,498,555 dan Rp.3,465,397. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan).

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga Pengadilan Tinggi Bengkulu per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 16 Rincian Utang kepada Pihak Ketiga
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	1,257,498,555	Adalah Belanja Pegawai berupa Gaji Induk Bulan Oktober yang dibuatkan SPM nya dibulan September, namun SP2D nya terbit tanggal 1 Oktober2022
Jumlah		1,257,498,555	

C.4.2 Utang yang Belum Ditagihkan

Utang yang Belum
Ditagihkan:
Rp.27,180,221

Jumlah Utang yang Belum Ditagihkan per 30 September 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.27,180,221 dan Rp.0. Utang yang belum ditagihkan adalah merupakan BAST/SPBy yang belum di SPP kan per 30 September 2023 .

Adapun rincian Utang Utang yang Belum Ditagihkan Pengadilan Tinggi Bengkulu per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 30 Rincian Utang yang Belum Ditagihkan
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.	BAST/SPBy Belum SPP	27,180,221	Terdiri dari BAST Belanja KKP yang belum diterima tagihannya dan kwitansi UP yang belum di SPM kan.
Jumlah		27,180,221	

C.4.3 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari
KPPN:
Rp.60,000,000.-

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 September 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.60,000,000,-. Uang Muka dari KPPN merupakan

uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.5. Ekuitas

*Ekuitas:
Rp.33,473,757,818*

Ekuitas per 30 September 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.33,473,757,818 dan Rp.35.091.699.254 . Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Pendapatan PNBp
: Rp.31,044,526

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp.31,044,526 dan Rp.25,046,533 . Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 31 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBp per 30 September TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	24,478,000	23,177,600	94.67
2.	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	7,767,567	0
3.	Pendapatan Anggaran Lain-Lain	0	99,359	0
Total Pendapatan		24,478,000	31,044,526	126.83

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai :
Rp.15,265,921,522

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.15,265,921,522 dan Rp.14.634.954.076.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 17 Rincian Beban Pegawai per 30 September TA 2023 dan TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	3,648,268,640	3.782.093.092	(133,824,452)	(3.54)
Beban Pembulatan Gaji PNS	50,201	48.102	2,099	4.36
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	282,272,570	299.153.364	(16,880,794)	(5.64)

Beban Tunj. Anak PNS	58,971,614	53.194.359	5,777,255	10.86
Beban Tunj. Struktural PNS	78,435,000	80.460.000	(2,025,000)	(2.52)
Beban Tunj. Fungsional PNS	8,130,076,000	7.477.578.000	652,498,000	8.73
Beban Tunj. PPh PNS	1,560,933,857	1.501.609.982	59,323,875	3.95
Beban Tunj. Beras PNS	156,743,640	161.016.420	(4,272,780)	(2.62)
Beban Uang Makan PNS	382,230,000	392.071.000	(9,841,000)	(2.51)
Beban Tunjangan Umum PNS	42,740,000	44.730.000	(1,990,000)	(4.45)
Beban Tunjangan Hakim Ad Hoc	925,200,000	768.000.000	157,200,000	20.47
Beban Uang Lembur	0	0	0	0
Total Beban Pegawai	15,265,921,522	14.634,954.076	630,967,446	4.31

D.3. Beban Persediaan

*Beban Persediaan
: Rp.53,494,400*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.53,494,400 dan Rp.68.607.000 .

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 33 Rincian Beban Persediaan per 30 September TA 2023 dan TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	53,494,400	68.607.000	(15,112,600)	(22.03)
	0	0	0	0,00
Total Beban Persediaan	53,494,400	68.607.000	(15,112,600)	(22.03)

D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang &
Jasa :
Rp.1,517,402,928*

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.1,517,402,928 dan Rp.1.637.526.672 . Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 34 Rincian Beban Barang dan Jasa per 30 September TA 2023 dan TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
Beban Keperluan Perkantoran	442,417,293	463.572.330	(21,155,037)	(4.56)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	7,331,000	10.708.475	(3,377,475)	(31.54)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	56,312,000	43.488.000	12,824,000	29.49
Beban Barang Operasional Lainnya	38,380,770	57.874.330	(19,493,560)	33.68
Beban Barang Operasional -- Penanganan Pandemi Covid-19	0	21.233.000	(21,233,000)	(100)
Beban Bahan	0	21.574.200	(21,574,200)	(100)
Beban Langganan Listrik	0	138.584.145	(138,584,145)	(100)
Beban Langganan Telepon	997,534	1.199.689	(202,155)	(16.85)
Beban Langganan Air	2,797,200	2.533.500	263,700	10.41
Beban Sewa	962,447,131	861.716.003	100,731,128	11.69
Beban Jasa Profesi	0	4.400.00	(4,400,000)	(100)
Beban Jasa Lainnya	1,200,000	2.000.000	(800,000)	(40)
Beban Jasa--Penanganan Pandemi COVID-19	0	8.643.000	(8,643,000)	(100)
Total Beban Barang dan Jasa	1,517,402,928	1.637.526.672	(120,123,744)	(7.34)

D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban Pemeliharaan:
Rp.665,833,636*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.665,833,636 dan Rp.400.477.945. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 35 Rincian Beban Pemeliharaan per 30 September TA 2023 dan TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	375,016,255	148.988.268	(133.060)	(0.09)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	44,714,640	24.173.000	(70.488.500)	(74.46)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	230,812,482	213.655.937	66.954.727	45.64
Beban Persediaan bahan untuk Pemeliharaan	15,290,259	13.660.740	(319.870)	(2.29)
Total Beban Pemeliharaan	665,833,636	400.477.945	(3.986.703)	(0.99)

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas :
Rp.133,735,314

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.133,735,314 dan Rp.266.749.947. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 36 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 September TA 2023 dan TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	127,585,314	152.929.947	(25,344,633)	(16.57)
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	6.150.000	6.300.000	(150,000)	(2.38)
Beban Perjalanan Paket Meeting dalam Kota	0	107.520.000	(107,520,000)	(100)
Total Beban Perjalanan Dinas	133,735,314	266.749.947	(133,014,633)	(49.86)

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat : Rp.0

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk

mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2016.

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 37 Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 30 September TA 2023 dan TA 2022 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Total Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0	0

D.8. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial : Rp.0

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0. dan Rp.0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 38 Rincian Beban Bantuan Sosial per 30 September TA 2023 dan TA 2022 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0	0
Total Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi : Rp.385,199,111

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.385,199,111 dan Rp.419.165.549. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 39 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 September TA 2023 dan TA 2022 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	115,017,897	143,537,022	(28,519,125)	(19.87)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	270,181,214	264,150,102	6,031,112	(2.28)
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional	0	11,478,425	(11,478,425)	(100)
Jumlah Penyusutan	385,199,111	419,165,549	(33,966,438)	(8.10)
Beban Amortisasi Aset tak Berwujud	0	0	0	0
Beban Penyusutan Aset lain-lain	0	0	0	0
Jumlah Amortisasi	0	0	0	0
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	385,199,111	419,165,549	(33,966,438)	(8.10)

D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih : Rp.0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 40 Rincian Beban Piutang tak Tertagih
per 30 September TA 2023 dan TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	0	0	0	0
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	0	0	0	0
Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	0	0	0	0

D.11. Beban Lain-lain

Beban Lain-Lain :
Rp.0.

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 41 Rincian Beban Lain-lain
per 30 September TA 2023 dan TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Aset Ekstrakomptabel Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Lain-lain	0	0	0	0

D.12. Kegiatan Non Operasional

Beban Kegiatan
Non Operasional :
Rp.0

Pos Surplus (defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus (defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 42 Rincian Kegiatan Non Operasional
per 30 September TA 2023 dan TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	0
Total Surplus (defisit) dari kegiatan Non Operasional	0	0	0	0

D.13. Pos Luar Biasa

Beban Pos Luar Biasa : Rp.0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 43 Rincian Pos Luar Biasa
per 30 September TA 2023 dan TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
Beban Luar Biasa	0	0	0	0
Total Pos Luar Biasa	0	0	0	0

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal : Rp.35,060,396,979 Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.35,060,396,979 dan Rp.35.091.699.254.

E.2. Surplus (Defisit) LO

Surplus(defisit) LO : Rp.(17,990,542,385) Jumlah Surplus/Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp.(17,990,542,385) dan Rp.(17.370.233.444). Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi /Kesalahan mendasar : Rp.0. Tidak terdapat transaksi dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendasar untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023

E.4. Koreksi Menambah/Mengurangi

E.4.1. Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset : Rp.0. Nilai Penyesuaian Nilai Aset per 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

E.4.2. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan : Rp.0

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 44 Rincian Koreksi Nilai Persediaan
per 30 September TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Barang Persediaan Lainnya	0
Total Koreksi Nilai Persediaan	0

E.4.3. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi
Aset Tetap : Rp.0.

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0. dan Rp.0.

E.4.4. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset
Tetap Non
Revaluasi: Rp.0

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.(20.840.895,-) dan Rp.(20.840.895,-). Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Tabel 5 Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2023

Jenis Aset tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	0
Gedung dan Bangunan	0
Jumlah	0

E.4.5. Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-
lain : Rp.0

Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi antar beban, koreksi antar hibah, piutang dan utang. Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 .

Rincian Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 46 Rincian Koreksi Lain-lain
per 30 September TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi Beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Utang	0
Koreksi Hibah	0
Total Koreksi Lain-lain	0

E.5. Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar
Entitas :
Rp.16,403,903,224

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.16,403,903,224 dan Rp.16.413.757.038. Rincian Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 47 Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas
per 30 September TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Transaksi antar entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	16,339,612,462
Diterima dari Entitas Lain	(27,190,488)
Transfer Keluar	(0)
Transfer Masuk	91,481,250
Pengesahan Hibah Langsung	0
Jumlah	16,403,903,224

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 September 2023, DDEL sebesar Rp.(27,190,488) sedangkan DKEL sebesar Rp.16,339,612,462.

E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L dan antara K/L dengan BA-BUN. terdapat transaksi Transfer Masuk sampai dengan tanggal 30 September 2023.

Tabel 48 Rincian Transfer Masuk
(dalam satuan Rupiah)

Jenis	Entitas Asal	Nilai (Rp)
-	-	0
Jumlah		0

E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung K/L dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 September 2023 sebesar Rp.0 dari total Rp.0 yang diterima sepanjang tahun 2023. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 September 2023 adalah Rp.0.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 49 Rincian Pengesahan Hibah
(dalam satuan Rupiah)

Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
-	-	0
Total Pengesahan		0
Pengesahan Pengembalian Hibah		0
Jumlah		0

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2023 disajikan pada lampiran.

E.6. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir : Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah
Rp.33,473,757,818 masing-masing sebesar Rp.33,473,757,818 dan Rp.34.114.381.953 .

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak ada temuan BPK yang dapat diungkapkan dalam laporan keuangan Triwulan III TA 2023 ini maupun periode yang lalu.

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Tidak Terdapat Pendapatan dan Belanja secara Akrual yang perlu dijelaskan pada Laporan Keuangan Triwulan III Tahun Anggaran 2023.

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah:

Rekening Virtual Account pada BRI Cabang Bengkulu A/653244005121000 A.n BPG 016 PENGADILAN TINGGI BENGKULU yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 30 September 2023 sebesar Rp.0.

Nomor Surat Ijin (Perubahan Nama Rekening) dari KPPN : S-2732/WPB.12/KP.06/2020 Tanggal 16 Oktober 2020.

F.2.4. Revisi DIPA

Informasi mengenai revisi DIPA dapat dijabarkan sebagai berikut :

Informasi mengenai revisi DIPA dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Revisi DIPA ke-2 Halaman III DIPA dan Pengesahan POK Tanggal 14 Februari 2023
2. Revisi DIPA ke-3 Halaman III DIPA dan Pengesahan POK tanggal 17 April 2023
3. Revisi DIPA ke-4 Halaman III DIPA dan Pengesahan POK tanggal 19 Juni 2023

4. Revisi DIPA KE-5 Halaman III DIPA dan Pengesahan POK tanggal 10 Juli 2023
5. Revisi DIPA ke-6 Halaman III DIPA dan Pengesahan POK tanggal 21 Agustus 2023
6. Revisi DIPA ke-7 Halaman III DIPA dan Pengesahan POK tanggal 4 September 2023

F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Informasi mengenai Ralat SPM yang dapat dilaporkan dalam laporan keuangan Triwulan III TA 2023 ini adalah sebagai berikut :

1. Nomor SPM : 00098A PENGADILAN TINGGI BENGKULU
Tanggal SPM : 25 Mei 2023
Yang telah diterbitkan SP2D :
Nomor SP2D : 230161301006659
Tanggal SP2D : 30 Mei 2023
Koreksi dimaksud adalah karena adanya Ralat Akun Potongan
Sebelumnya 811131 & 811135
Menjadi 425999

F.2.6. Catatan Penting Lainnya

Tidak terdapat Catatan Penting Lainnya setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

LAPORAN PENDUKUNG

*A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN
NILAI BUKU ASET TETAP*

Pengadilan Tinggi Bengkulu
Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap
untuk Periode yang Berakhir pada 30 September 2023

No.	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
A.	Tanah		28,332,813,000	0	28,332,813,000
1.	Tanah Persil		28,332,813,000	0	28,332,813,000
B.	Peralatan dan Mesin		4,907,657,615	(4,187,989,330)	719,668,285
1.	Alat Bantu	7	0	0	0
2.	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	1,318,683,912	(1,318,683,912)	0
3.	Alat Ukur	5	0	0	0
4.	Alat Kantor	5	485,377,688	(479,341,688)	6,036,000
5.	Alat Rumah Tangga	5	1,422,189,486	(1,387,047,736)	35,141,750
6.	Alat Studio	5	35,306,000	(28,244,800)	7,061,200
7.	Alat Komunikasi	5	27,096,100	(25,280,440)	1,815,660
8.	Alat Kedokteran	5	0	0	0
9.	Peralatan Pemancar	8	396,500,000	(59,475,000)	337,025,000
10.	Komputer Unit	4	963,483,429	(734,652,754)	228,830,675
11.	Peralatan Komputer	4	258,221,000	(154,463,000)	103,758,000
12.	Unit Peralatan Proses/produksi	8	0	0	0
13.	Peralatan Olah Raga	3	800,000	800,000	0
C.	Gedung dan Bangunan		9,660,923,000	(4,007,629,846)	5,653,293,154
1.	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	7,345,104,000	(2,579,984,066)	4,765,119,934
2.	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	2,315,819,000	(1,427,645,780)	888,173,220
D.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		0	0	0
E.	Aset Tetap Lainnya		18,680,950	0	18,680,950
1.	Bahan Perpustakaan Tercetak	-	18,680,950	0	18,680,950
2.	Tanda Penghargaan Bidang Olah Raga	-	0	0	0
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		42,920,074,565	(8,195,619,176)	34,724,455,389
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya		42,920,074,565	(8,195,619,176)	34,724,455,389

*B. INFORMASI HIBAH
LANGSUNG BERUPA
UANG/BARANG/JASA*

